

## **Pemberdayaan Sosial Ekonomi Warga Pasca-Relokasi di Rusunawa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung**

**Setia Rahayu Fadilah<sup>1</sup>, Irwandi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, setiarahayu725@gmail.com

<sup>2</sup>Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, irwandi@uinsgd.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan sosial ekonomi warga pasca-relokasi dari kolong Jembatan Pasupati ke Rusunawa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Relokasi ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya penataan kota dan peningkatan kualitas hidup warga miskin kota. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diberikan, seperti bantuan tunai dan pelatihan keterampilan, belum mampu mendorong kemandirian ekonomi warga secara optimal. Seluruh warga diwajibkan mengikuti pelatihan menjahit, hidroponik, dan tata boga, namun keterbatasan akses terhadap modal, alat kerja, serta pendampingan usaha menjadi hambatan utama. Selain itu, relokasi juga berdampak pada menurunnya kohesi sosial warga akibat perubahan lingkungan dan minimnya ruang interaksi sosial. Pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat formal dan belum terintegrasi dengan kebutuhan nyata warga. Oleh karena itu, pemberdayaan pasca-relokasi perlu dirancang secara lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi serta kondisi sosial ekonomi warga agar relokasi tidak hanya memindahkan tempat tinggal, tetapi juga mampu membangun kehidupan baru yang mandiri dan berdaya.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Relokasi, Sosial Ekonomi.

### **Latar Belakang**

Perkembangan urbanisasi di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), tingkat urbanisasi Indonesia telah mencapai 57,63%, dengan proyeksi akan menyentuh 66,6% pada tahun 2035. Pertumbuhan penduduk kota ini tidak selalu diiringi dengan distribusi infrastruktur dan akses sosial ekonomi yang merata. Salah satu dampaknya adalah munculnya kawasan permukiman kumuh di wilayah-wilayah perkotaan, termasuk Kota Bandung, di mana sekitar 2.038 hektare kawasan masih tergolong sebagai wilayah kumuh ringan hingga berat (*Dirjen Cipta Karya, 2022*). Kehidupan di area marginal seperti kolong jembatan bukan hanya merefleksikan krisis hunian layak, tetapi juga mencerminkan ketimpangan akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk menanggulangi hal ini, program relokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi strategi yang ditempuh oleh pemerintah kota maupun pusat sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang dan pengentasan kemiskinan kota.

Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah relokasi sekitar 107 kepala keluarga dari kolong Jembatan Prof. Mochtar Kusumaatmadja (Pasupati), Kota Bandung, ke Rusunawa Solokan Jeruk dan Rancaekek, yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Baznas. Berdasarkan laporan Diskominfo Kota Bandung (2024), program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup warga melalui penyediaan hunian layak dan fasilitas sosial. Namun, hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan realitas yang jauh dari ekspektasi. Banyak warga mengalami kendala serius dalam proses adaptasi sosial dan ekonomi. Sementara itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung pada tahun 2023 masih tercatat sebesar 6,54%, dengan kecenderungan stagnan dalam lima tahun terakhir (*BPS Jawa Barat, 2023*). Ini menunjukkan bahwa relokasi ke wilayah tersebut tidak serta-merta menjamin perbaikan ekonomi warga secara otomatis.

Kondisi ini mengindikasikan adanya gap antara kebijakan dan praktik pemberdayaan. Banyak kajian dan laporan kebijakan hanya menitikberatkan pada keberhasilan fisik relokasi yakni berhasil memindahkan warga dari kawasan kumuh ke hunian vertikal namun kurang menyentuh aspek pembangunan kapasitas sosial dan ekonomi warga (Travesjy, 2019; Iqbal & Vonika, 2019; Damayanti, dkk., 2025). Dalam konteks ini, teori Struktural Fungsional Talcott Parsons sangat relevan untuk menganalisis fungsi adaptasi, integrasi, dan pemeliharaan nilai yang tidak berjalan secara optimal dalam sistem sosial pasca relokasi. Misalnya, warga yang sebelumnya memiliki jaringan ekonomi informal di kota, kehilangan akses dan mengalami ketergantungan pada bantuan. Minimnya upaya integrasi sosial juga menimbulkan gejala individualisme di lingkungan rusunawa. Tanpa pemberdayaan yang komprehensif, relokasi berisiko menjadi pemindahan masalah, bukan penyelesaian.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pemberdayaan sosial ekonomi warga pasca relokasi ke Rusunawa Solokan Jeruk, dengan tujuan utama untuk mengevaluasi efektivitas bantuan dan program intervensi sosial pemerintah dalam membangun kembali ketahanan sosial dan ekonomi warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman warga secara mendalam dan melihat sejauh mana relokasi mampu menjalankan fungsi-fungsi sosial yang diharapkan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep pemberdayaan di ranah sosiologi urban, serta menjadi masukan praktis bagi penyusunan kebijakan relokasi dan penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### **Tinjauan Pustaka**

Pemberdayaan sosial ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengakses sumber daya, mengelola kehidupan secara mandiri, dan memperkuat posisi tawar dalam sistem sosial yang lebih luas (Suharto, 2009). Dalam konteks warga miskin kota, pemberdayaan tidak hanya mencakup aspek ekonomi seperti pelatihan dan bantuan modal, tetapi juga aspek sosial seperti integrasi komunitas, kepercayaan sosial, dan partisipasi kolektif (Ife & Tesoriero, 2006). Keberhasilan pemberdayaan diukur dari peningkatan kemampuan warga dalam mengatasi kerentanan, memanfaatkan peluang, dan memperkuat keberlanjutan hidup secara mandiri.

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (1951) sebagai pendekatan teoritis. Parsons memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari subsistem yang saling terkait dan berfungsi mempertahankan stabilitas sosial. Ia mengembangkan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial bertahan dan berkembang. Dalam konteks relokasi dan pemberdayaan, keempat fungsi ini dapat digunakan untuk menilai apakah sistem sosial pasca-relokasi mampu mengakomodasi adaptasi warga, mewujudkan tujuan pembangunan, membangun integrasi sosial, serta mempertahankan nilai-nilai komunitas.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses, pengalaman, dan dinamika sosial ekonomi warga yang terdampak program relokasi ke Rusunawa Solokan Jeruk. Studi kasus dinilai relevan karena fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi bentuk-bentuk pemberdayaan yang dijalankan pasca-relokasi serta bagaimana warga beradaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi yang terjadi.

Lokasi penelitian ini berada di Rusunawa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Lokasi ini dipilih secara purposive karena merupakan salah satu titik utama

pelaksanaan relokasi warga dari kolong Jembatan Pasupati, Kota Bandung, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Baznas. Rusunawa ini menjadi fokus karena selain sebagai tempat tinggal baru bagi warga, di lokasi ini pula diselenggarakan berbagai program bantuan, pelatihan, dan intervensi sosial ekonomi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan warga relokasi, terutama kepala keluarga dan anggota dewasa lainnya yang mengalami langsung proses relokasi serta berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang naratif yang lebih bebas kepada informan dalam menceritakan pengalaman mereka. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berita online, laporan pemerintah, serta jurnal dan buku yang relevan dengan topik relokasi dan pemberdayaan masyarakat.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi data yang paling relevan dengan fokus kajian, seperti pelatihan keterampilan, realisasi bantuan, dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi warga. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan penafsiran, dengan mengelompokkan temuan ke dalam isu-isu utama seperti adaptasi ekonomi, integrasi sosial, serta ketergantungan terhadap bantuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan gambaran umum mengenai efektivitas program pemberdayaan pasca-relokasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

## **Hasil Kegiatan**

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan realitas sosial ekonomi warga pasca relokasi ke Rusunawa Solokan Jeruk dengan fokus pada efektivitas program pemberdayaan yang diterapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana program-program bantuan dan pelatihan yang telah dirancang dan dilaksanakan mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi warga, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan warga, serta dokumentasi pendukung, ditemukan sejumlah kendala struktural dan fungsional yang menghambat tercapainya pemberdayaan yang ideal. Temuan utama dari penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga aspek berikut:

### **1. Ketidaksesuaian Realisasi Program Bantuan dan Pemberdayaan**

Salah satu fokus utama relokasi adalah menjamin keberlangsungan hidup warga di lingkungan baru melalui penyediaan bantuan ekonomi dan pendampingan sosial. Pemerintah menjanjikan sejumlah bantuan, antara lain bantuan tunai awal sebesar Rp 840.000, bantuan bulanan rutin sebesar Rp 600.000, serta pelatihan keterampilan. Namun dalam kenyataannya, hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan tunai awal tidak pernah diterima oleh warga. Sebagai gantinya, warga hanya menerima paket sembako yang jumlah dan kualitasnya tidak sesuai dengan nilai nominal yang dijanjikan. Distribusi bantuan sembako ini pun dinilai tidak merata dan tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pihak penyelenggara.

Bantuan bulanan sebesar Rp 600.000 per keluarga justru menjadi satu-satunya bentuk bantuan yang dapat diandalkan, karena disalurkan secara langsung ke rekening warga dan diterima secara rutin. Dana ini terdiri dari dua sumber, yaitu Baznas Provinsi Jawa Barat dan Baznas Kota Bandung. Bantuan ini dirasakan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti bahan makanan, perlengkapan anak, dan transportasi. Namun karena sifatnya yang konsumtif, bantuan ini belum mampu mendorong proses pemberdayaan dalam arti sebenarnya. Tidak adanya mekanisme lanjutan yang mengubah bantuan menjadi stimulus

ekonomi membuat sebagian warga menjadi pasif dan sangat bergantung pada bantuan tersebut, tanpa strategi nyata untuk membangun kemandirian.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain bantuan dalam kebijakan relokasi dan implementasinya di lapangan. Harapan warga terhadap program bantuan tidak terpenuhi secara utuh, dan lemahnya transparansi mengenai hak dan prosedur penyaluran bantuan memperburuk situasi. Akibatnya, alih-alih menjadi titik tolak kemandirian, bantuan justru menjadi bentuk ketergantungan baru bagi sebagian besar warga relokasi.

## **2. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan sebagai Instrumen Pemberdayaan**

Program pelatihan keterampilan menjadi salah satu komponen kunci dari strategi pemberdayaan pasca-relokasi. Pemerintah mewajibkan seluruh warga untuk mengikuti pelatihan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan penguatan ekonomi keluarga. Pelatihan yang diberikan meliputi keterampilan menjahit, hidroponik, dan tata boga. Secara teknis, pelatihan ini dilaksanakan dengan baik: warga hadir sesuai jadwal, menerima materi teori dan praktik, serta mendapatkan bahan praktik secara langsung dari penyelenggara.

Namun, substansi dan keberlanjutan dari pelatihan ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam aspek ekonomi. Pelatihan hidroponik, misalnya, dinilai kurang sesuai dengan kondisi hunian warga di rusunawa. Ruang terbuka yang sempit, tidak tersedianya tempat tanam, dan mahalnya alat pendukung membuat warga kesulitan untuk mempraktikkannya. Akhirnya, pengetahuan yang diperoleh hanya menjadi teori yang tidak dapat dimanfaatkan.

Hal serupa terjadi dalam pelatihan tata boga. Warga memang memperoleh keterampilan memasak makanan dan kue, tetapi tidak memiliki jaringan distribusi produk maupun akses pasar. Tidak ada platform atau dukungan promosi dari pemerintah atau pihak pengelola rusunawa yang dapat membantu menjembatani produk buatan warga ke konsumen. Pelatihan menjahit menjadi satu-satunya yang dianggap cukup potensial, karena aktivitasnya bisa dilakukan di dalam unit rusun. Namun, hambatan seperti ketiadaan mesin jahit, bahan baku, serta modal awal membuat keterampilan ini tidak bisa langsung dikembangkan menjadi usaha.

Selain itu, tidak adanya program pendampingan lanjutan seperti mentoring bisnis, pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, atau pembentukan kelompok usaha bersama semakin memperlemah dampak pelatihan. Banyak warga yang setelah pelatihan merasa bingung harus mulai dari mana, bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan keterampilan mereka untuk membuka usaha. Tidak adanya sistem yang menghubungkan pelatihan dengan peluang ekonomi menyebabkan warga kembali pada pola ketergantungan dan kehilangan kepercayaan pada proses pemberdayaan itu sendiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dijalankan belum terencana secara berkelanjutan dan sistemik. Pelatihan hanya menjadi kegiatan formalitas, tanpa adanya jembatan ke kegiatan ekonomi nyata. Warga tidak diberdayakan dalam arti sesungguhnya karena tidak dibekali sarana dan sistem yang memungkinkan mereka tumbuh secara mandiri di lingkungan baru.

## **3. Tantangan Adaptasi Sosial Ekonomi dan Struktur Komunitas Baru**

Relokasi tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Di lingkungan sebelumnya, yaitu kolong Jembatan Pasupati, warga hidup dalam pola komunitas yang erat. Mereka memiliki interaksi sosial harian yang intens, mengenal satu sama lain, dan saling bergantung dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem sosial berbasis gotong royong dan solidaritas menjadi kekuatan komunitas tersebut, meskipun mereka tinggal dalam kondisi tidak layak secara fisik.

Namun, setelah direlokasi ke Rusunawa Solokan Jeruk, pola sosial ini berubah drastis. Tinggal di unit-unit tertutup dengan akses terbatas antarwarga menyebabkan interaksi sosial menurun drastis. Aktivitas kolektif seperti ronda malam, kerja bakti, arisan, atau pertemuan

warga tidak lagi rutin dilakukan. Warga lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar masing-masing, dan ruang sosial seperti selasar, tangga, atau halaman tidak dimanfaatkan sebagai sarana interaksi.

Gejala melemahnya kohesi sosial juga terlihat dari mulai munculnya kelompok-kelompok kecil berdasarkan asal daerah atau kedekatan personal, yang tidak inklusif terhadap warga lainnya. Sebagian warga merasa tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial, baik karena keterbatasan infrastruktur sosial maupun karena tidak adanya fasilitasi dari pihak pengelola. Ketiadaan pengorganisasian komunitas atau forum warga menyebabkan proses integrasi sosial berjalan lambat dan tanpa arah yang jelas.

Dari sisi ekonomi, tantangan adaptasi juga tidak kalah besar. Kehilangan pekerjaan lama, ditambah dengan tidak tersedianya lapangan kerja baru di sekitar rusunawa, membuat sebagian besar warga sulit memenuhi kebutuhan dasar. Belum ada program pemerintah yang secara konkret menghubungkan warga dengan dunia kerja lokal atau menciptakan peluang ekonomi yang berbasis pada potensi komunitas. Akibatnya, kemandirian ekonomi belum terwujud, dan warga masih sangat bergantung pada bantuan bulanan yang disediakan pemerintah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan adaptasi sosial ekonomi pasca-relokasi bersifat multidimensi—melibatkan persoalan struktural, kelembagaan, dan kultural. Upaya pemberdayaan yang semestinya menjadi kunci pemulihan dan penguatan warga belum dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan. Ke depan, strategi pemberdayaan pasca-relokasi perlu dibangun dengan pendekatan partisipatif, integratif, dan berbasis pada kebutuhan serta potensi riil warga di lingkungan barunya.

## **Pembahasan**

Program relokasi warga dari kolong Jembatan Pasupati ke Rusunawa Solokan Jeruk membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi warga, khususnya dalam hal proses pemberdayaan. Relokasi ini pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang kota dan pengentasan permukiman kumuh yang selama ini menjadi tantangan besar di kota-kota besar, termasuk Bandung. Namun demikian, relokasi tidak cukup hanya dipahami sebagai upaya pemindahan tempat tinggal dari lokasi yang tidak layak ke bangunan fisik yang lebih layak. Relokasi adalah proses sosial yang kompleks karena menyangkut perubahan pola hidup, hubungan sosial, serta akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sosial yang baru.

Secara ideal, relokasi seharusnya membuka peluang baru bagi warga untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya dari segi tempat tinggal, tetapi juga dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Dalam konteks ini, pemberdayaan menjadi bagian yang sangat penting. Pemberdayaan tidak cukup dimaknai sebagai pemberian bantuan atau pelatihan, melainkan sebagai proses membangun kapasitas warga untuk mandiri dan berdaya menghadapi perubahan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial ekonomi pasca-relokasi belum berjalan secara optimal dan masih jauh dari harapan awal (Mawar, dkk., 2022).

Pemerintah telah menyediakan bantuan tunai bulanan sebesar Rp600.000 per keluarga, yang terdiri atas dana dari Baznas Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, sebagai bentuk dukungan terhadap transisi ekonomi warga. Selain itu, seluruh warga diwajibkan mengikuti pelatihan keterampilan sebagai bagian dari program pemberdayaan, dengan harapan pelatihan ini mampu menjadi titik awal bagi warga untuk menciptakan sumber penghasilan baru. Jenis pelatihan yang diberikan antara lain keterampilan menjahit, hidroponik, dan tata boga. Secara administratif, pelaksanaan program ini sudah sesuai prosedur: warga hadir, instruktur menyampaikan materi, dan warga mengikuti praktik. Namun, keterlaksanaan yang baik secara teknis tidak selalu berarti efektif secara substansial.

---

---

Pelatihan-pelatihan yang disediakan belum cukup kuat untuk mengubah kondisi ekonomi warga secara nyata. Banyak warga merasa bahwa keterampilan yang mereka pelajari tidak dapat diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pelatihan hidroponik dinilai kurang relevan dengan kondisi fisik rusun yang tidak menyediakan ruang terbuka memadai untuk kegiatan tanam. Warga menyebutkan bahwa pelatihan ini sulit dipraktikkan, apalagi tanpa peralatan lanjutan dan tempat khusus yang memungkinkan tanaman berkembang. Hal serupa terjadi dalam pelatihan tata boga. Meskipun keterampilan memasak dianggap berguna, warga kesulitan menjual hasil produk mereka karena tidak memiliki jaringan pemasaran, konsumen tetap, atau platform penjualan yang memadai.

Pelatihan menjahit merupakan salah satu yang dianggap cukup sesuai karena bisa dilakukan dari dalam hunian, namun keterbatasan alat seperti mesin jahit, benang, dan modal usaha tetap menjadi hambatan besar. Bahkan ada warga yang menyatakan bahwa setelah pelatihan selesai, mereka tidak tahu harus melanjutkan dari mana karena tidak ada pendampingan lebih lanjut atau tindak lanjut dari penyelenggara pelatihan. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh dari pelatihan hanya berhenti sebagai pengetahuan, belum menjadi keterampilan hidup yang produktif secara ekonomi. Warga pada akhirnya tetap bergantung pada bantuan bulanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat terputus dan tidak berkelanjutan. Tidak ada kesinambungan antara pelatihan yang diberikan dengan ekosistem pendukung yang seharusnya tersedia, seperti akses terhadap modal usaha, bimbingan usaha, pendampingan komunitas, maupun wadah pemasaran hasil produk. Program pelatihan juga tidak diiringi dengan pembentukan kelompok usaha atau koperasi warga yang dapat menampung dan mengelola keterampilan warga menjadi kekuatan kolektif. Warga pada akhirnya hanya menjalani proses pelatihan sebagai kewajiban formal, bukan sebagai ruang aktualisasi atau pengembangan diri yang berdampak nyata pada peningkatan pendapatan.

Dalam konteks pemberdayaan, ini menjadi persoalan mendasar. Sebab, tujuan dari pemberdayaan bukan sekadar memberi informasi atau melatih keterampilan, tetapi menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung transformasi warga dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Ketika pelatihan tidak terhubung dengan fasilitas pendukung, maka warga seolah-olah “dibiarkan mandiri” secara formal, padahal secara struktural mereka masih terisolasi dari akses-akses dasar yang diperlukan untuk berkembang. Inilah yang menjadi titik kritis dari upaya pemberdayaan pasca-relokasi.

Dari sisi sosial, relokasi juga membawa dampak besar terhadap struktur dan pola hubungan antarwarga. Sebelum direlokasi, warga yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati hidup dalam lingkungan yang sempit, namun penuh interaksi sosial. Solidaritas dan rasa saling percaya terbentuk karena kedekatan fisik dan aktivitas harian yang terhubung. Setelah pindah ke rusunawa, pola ini berubah drastis. Tinggal di unit-unit tertutup yang dipisahkan oleh dinding beton dan tanpa ruang bersama yang cukup membuat interaksi antarwarga menurun. Warga lebih banyak berada di dalam kamar, dan aktivitas sosial menjadi terbatas. Kegiatan seperti kerja bakti, arisan, atau pertemuan warga tidak lagi semarak seperti sebelumnya.

Minimnya inisiatif dari pemerintah daerah atau pengelola rusun untuk membentuk forum warga, komunitas pendukung, atau kelompok kerja menjadi faktor lain yang memperlemah integrasi sosial. Beberapa warga bahkan merasa kehilangan “rasa kebersamaan” yang dulu mereka rasakan di lingkungan lama. Ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan, dan ruang sosial tidak terbentuk, maka warga akan merasa terasing di tempat baru, meskipun tinggal di hunian yang lebih layak. Hal ini sesuai dengan temuan Sutantio, dkk. (2021), yang menyatakan bahwa relokasi yang tidak diiringi pendekatan sosial dapat menimbulkan keterasingan dan keterputusan sosial di kalangan warga.

---

Dalam konteks ini, teori struktural fungsional Talcott Parsons dapat membantu menjelaskan bahwa keberhasilan sistem sosial bergantung pada berjalannya empat fungsi utama secara seimbang, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL). Bila dikaitkan dengan kondisi warga pasca-relokasi, tampak bahwa fungsi adaptasi belum berjalan optimal karena warga tidak memiliki akses untuk menyesuaikan diri secara ekonomi. Fungsi pencapaian tujuan juga belum tercapai karena tujuan relokasi dan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian belum terwujud. Integrasi sosial melemah karena tidak ada ruang kolektif dan interaksi warga yang memadai. Nilai-nilai seperti gotong royong dan solidaritas pun belum kembali tumbuh karena lemahnya dukungan sosial dan lemahnya inisiatif fasilitasi dari atas.

Dengan demikian, relokasi yang dilakukan sejauh ini masih bersifat administratif—berhasil memindahkan warga dari kawasan kumuh ke rusun, tetapi belum menciptakan sistem sosial baru yang mendukung pemberdayaan dan kemandirian. Tanpa pembenahan menyeluruh dan strategi pemberdayaan yang terintegrasi secara sosial dan ekonomi, maka warga berpotensi terus berada dalam kondisi ketergantungan dan keterasingan di tengah lingkungan yang semestinya menjadi awal kehidupan baru..

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan sosial ekonomi warga pasca-relokasi di Rusunawa Solokan Jeruk, dapat disimpulkan bahwa relokasi memberikan perubahan signifikan terhadap kehidupan warga, khususnya dalam hal akses ekonomi dan struktur sosial. Program bantuan tunai dan pelatihan keterampilan yang diwajibkan bagi seluruh warga telah terlaksana, namun belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian. Keterbatasan akses terhadap modal, alat produksi, pemasaran, serta ketiadaan pendampingan lanjutan menyebabkan keterampilan yang diperoleh warga belum berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih bersifat formal dan belum terintegrasi dengan kebutuhan nyata warga relokasi.

Selain itu, relokasi turut mengubah dinamika sosial warga. Pola kehidupan komunal yang terbentuk di tempat tinggal lama menjadi lebih individualistik di lingkungan rusunawa yang tertutup. Minimnya ruang interaksi dan belum adanya upaya fasilitasi sosial dari pihak pemerintah membuat integrasi sosial berjalan lambat. Maka dari itu, pemberdayaan warga pasca-relokasi memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga penguatan struktur sosial dan ekonomi yang memungkinkan warga tumbuh secara mandiri dan bermartabat di lingkungan barunya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya kepada Jurusan Sosiologi yang telah memberikan dukungan akademis dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing praktikum keahlian yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan artikel ini berlangsung. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam kajian pemberdayaan sosial

ekonomi masyarakat pasca-relokasi, serta menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### Referensi

- Bandung, P. K. (n.d.). *Wajah Baru Kolong Jembatan Pasupati Kini Jadi Lebih Humanis*. Retrieved from <https://bandung.go.id/news/read/10521/wajah-baru-kolong-jembatan-pasupati-kini-jadi-lebih-humanis>
- Barat, P. P. (2024). *Relokasi Warga Kolong Jembatan Pasupati, Langkah Nyata Menuju Kehidupan Lebih Layak*. Retrieved from: <https://www.jabarprov.go.id/berita/relokasi-warga-kolong-jembatan-pasupati-langkah-nyata-menuju-kehidupan-lebih-layak-16656>
- Barat., B. P. (2023). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Barat*. Retrieved from: <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/123/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Damayanti, S., Fadilah, S. R., Qiyantasari, Y. A., & Aruman, T. (2025). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Permukiman Kolong Pasupati ke Rusunawa Solokan Jeruk. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 255-268.
- Ife, J. &. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education.
- Iqbal, M., & Vonika, N. (2019). Dinamika Proses Relokasi di DKI Jakarta Studi Kasus: Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 1(1).
- Mawar, M., Sahrul, M., Rahman, A., Gultom, A., & Ma'rifah, N. (2022, October). Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Relokasi Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Rusunawa Rawabebek Jakarta. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Statistik, B. P. (2023). *Proyeksi penduduk Indonesia 2020–2035*.
- Suharto, E. (2005). *Membangaun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutantio, A., Ismawan, G., Karim, M. A. A. G. H., & Hantono, D. (2021). Dampak Relokasi Terhadap Perubahan Ruang dan Sosial Ekonomi Masyarakat Permukiman Kalijodo di Jakarta. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 13(1), 9-14.
- Travesty, J. (2019). *Perubahan Sosial Ekonomi Warga Kampung Pulo Pasca Relokasi di Rusunawa Jatinegara Barat Jakarta Timur* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
-